



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

BANTUAN KEMANUSIAAN UNTUK WARGA PALESTINA DI GAZA

Sita Hidriyah

Analisis Legislatif Ahli Madya
sita.hidriyah@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza semakin meningkat. Sudah 9.227 orang, termasuk 3.826 anak-anak dan 2.405 perempuan, menjadi korban. Lebih dari 100 petugas medis, 16 rumah sakit dan ambulans pembawa korban tidak luput dari serangan. Krisis yang diakibatkan oleh serangan dan invasi Israel sudah memasuki minggu keempat hingga mendorong banyak negara untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan.

Daftar negara yang berkomitmen memberi bantuan untuk warga Palestina terus bertambah, termasuk Amerika Serikat (AS) yang menjadi sekutu Israel. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa barang, makanan dan peralatan medis, namun juga peran sebagai perantara negosiasi dalam membebaskan sandera, seperti yang dilakukan oleh Qatar. Sayangnya pasokan bantuan yang diizinkan masuk ke Gaza sangat dibatasi oleh pihak Israel. Serangan udara Israel dan penutupan perbatasan menjadi kombinasi yang menempatkan penduduk sipil Gaza dalam situasi yang sulit untuk menyelamatkan diri.

Tahap pertama bantuan, sebanyak 50 ton lebih bagi kebutuhan rakyat Palestina, telah dikirimkan pemerintah Indonesia pada 4 November 2023. Bantuan tersebut merupakan gabungan bantuan antara pemerintah dan masyarakat dengan tiga lembaga yang menghimpun, yaitu BAZNAS, PMI, dan Humanitarian Forum Indonesia. Pihak TNI menyiapkan penerbangan dua pesawat C-130 Hercules dan personelnya bagi pengantaran bantuan yang diterbangkan. Presiden Joko Widodo yang melepas secara langsung di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, menyatakan jika pemerintah akan segera berkoordinasi dan menyiapkan bantuan tahap berikutnya dikarenakan antusiasme masyarakat Indonesia yang tinggi dalam membantu rakyat Palestina. Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, juga menyebutkan bahwa pemerintah akan menyiapkan pengiriman tahap kedua, termasuk peralatan kesehatan yang besar.

Pengiriman bantuan kemanusiaan memiliki nilai yang sangat berharga dalam berkehidupan. Pemukiman pengungsi dan warga sipil seharusnya dilindungi berdasarkan hukum kemanusiaan internasional (*International Humanitarian Law/IHL*). Serangan besar terhadap lingkungan pemukiman padat penduduk sama sekali tidak dapat diterima, sementara pengungsi dilindungi berdasarkan hukum humaniter internasional. Pihak-pihak yang berkonflik mempunyai kewajiban untuk melindungi mereka dari serangan. Perlindungan yang tidak didapat pengungsi ini memunculkan rasa prihatin dari pihak luar, termasuk Indonesia, sehingga terdorong menghentikan bertambahnya korban. Akibat jumlah korban yang terus bertambah, Israel harus didesak untuk menyediakan akses bagi bantuan kemanusiaan dan menyerukan komunitas internasional untuk terus memobilisasi bantuan.

Lingkaran pertumpahan darah, kebencian, dan polarisasi harus diakhiri sehingga rakyat Palestina dapat memperoleh perspektif yang jelas untuk mendirikan negaranya sendiri. Seluruh pihak terkait dan masyarakat internasional, khususnya PBB, perlu bertindak tepat

dalam mewujudkan perdamaian yang adil dan dapat diterima oleh para pihak yang berkonflik, khususnya Palestina yang selama ini dirugikan dan ditindas oleh penjajahan Israel. Solusi jangka pendek dan jangka panjang melalui jalan dialog untuk mewujudkan perdamaian perlu terus diupayakan.

Atensi DPR RI

Perang yang terjadi di Gaza perlu mendapatkan perhatian, antara lain soal pengiriman bantuan kemanusiaan terhadap warga Palestina di Gaza yang menjadi korban. Bantuan kemanusiaan tersebut merupakan wujud solidaritas dan kepedulian masyarakat internasional, termasuk Indonesia, terhadap korban perang di Gaza yang sudah berlangsung hampir sebulan. Di tengah pemberian bantuan kemanusiaan tersebut, penghentian peperangan dan perdamaian, sudah tentu perlu terus diupayakan oleh masyarakat internasional.

Komisi I DPR RI, melalui fungsi pengawasan, perlu ikut mengawal dan memastikan bantuan kemanusiaan yang dikirim oleh Indonesia untuk Palestina, khususnya ke Gaza, baik berupa bantuan untuk kelangsungan hidup warga Palestina maupun untuk keperluan medis, tersalurkan dengan baik. Selain itu, Komisi I DPR RI juga perlu mengingatkan Pemerintah (khususnya Kementerian Luar Negeri), untuk secara aktif melakukan diplomasi bagi terwujudnya kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Negara Palestina. Diplomasi parlemen juga perlu dilakukan oleh DPR RI untuk hal yang sama.

Sumber

cnnindonesia.com, 29 Oktober 2023;
kemlu.go.id, 4 November 2023;
Kompas, 2 November 2023;
presidenri.go.id, 4 November 2023;
voaindonesia.com, 4 November 2023.

Minggu ke-1 November
(30 Oktober s.d. 5 November 2023)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.